

DAFTAR BACAAN**1. Buku**

- Addink, G.H., *Algemene beginselen van behoorlijk bestuur*, kluwer, 1999.
- Adji, Indriyanto Seno, *Korupsi, Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*, CV Diedit Media, Jakarta, 2007.
- Al-Bahry, Dahlan Yakub, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Alkola, Surabaya, 2001.
- Alie, Faried, *Teori dan Konsep Administrasi: Dari Pemikiran Paradigmatik Menuju Redefinisi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cetakan Kedua, 2011.
- Amrah Muslimin, *Beberapa Asas dan Pengertian Pokok tentang Administrasi dan Hukum Administrasi*, Alumni, Bandung, 1985.
- Andrisman, Tri, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2007.
-, *Hukum Pidana Asas-Asas Dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, Lampung, 2009.
- Apeldoorn, L.J. van, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2009.
- Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan KUHP Baru*, Semarang, 2010.
-, *Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan*, Pustaka Magister, Semarang, 2012.
-, *Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Media Group, Jakarta, 2008.
- Atmasasmita, Romli, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, 1982.
-, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Prenadamedia, Romli Atmasasmita, 2013.
- Atmosudirdjo, Prajudi, *Hukum Administrasi Negara*, Gahalia Indonesia, Jakarta: 1983.

-, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan KUHP Baru*, Semarang, 2010.
- Bachsan, Mustafa, *Pokok-Pokok Administrasi Negara*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990.
- Basah, Sjachran, *Eksistensi dan Tolak Ukur Peradilan Administrasi di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1985.
- Bell, John, *et.al, Principles of French Law*, Oxford University Press, Oxford, 1998.
- Black, Henry Campbell, *Black's Law Dictionary, Revised Fourth Edition*, West Publishing, ST. Paul, Minn, 1968.
-, *Black'S Law Dictionary*, West Publishing, ST. Paul, Minn 1990,
- Moeimam, Susi dan Hein Steinhauer, *Kamus Belanda-Indonesia*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2005.
- Bruggink JJ.H. alih bahasa B. Arief Sidharta,SH., *Refleksi Tentang Hukum, Pengertian-Pengertian Dasar Dalam Teori Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.
-, *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Bull, Victoria, *Oxford Learner's Pocket Dictionary: Fourth Edition*, Oxford University Press, Oxford, 2012.
- Chazawi, Adami, *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005.
- Departemen Pendidikan Nasional Balai Pustaka, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, 2005.
- Djaja, Ermansyah, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Djatmiati, Tatiek Sri, *Maladministrasi dalam Konteks Kesalahan Pribadi dan Kesalahan Jabatan, Tanggung Jawab Pribadi dan Tanggung Jawab Jabatan*, dalam *Hukum Administrasi dan Good Governance*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2010.

- Enschede, CH. J., *Beginnselen van Strafrecht. !2 de druk*, Kluwer, Deventer, 2008.
- Effendy, Marwan, *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005.
-, *Teori Hukum*, ME Center Group, Jakarta, 2014.
- Garner, Bryan A., *Black's Law Dictionary*, New York: West, the 9th Edition, 2009.
- Gautama, Sudargo, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Alumni, Bandung, 1985.
- Gultom, Lodewijk, *Hand Out Filsafat Hukum*, FH Unkrisna, Jakarta, 2011.
- Hadjon, Philipus M., *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi Cetakan Kedua*, Gajahmada University Press, Yogyakarta, 2012.
-, *Hukum Administrasi dan Good Governance*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2012.
-, *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011.
-, *Pelindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
-, *Pengantar Hukum Administrasi*, Cet. VIII, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2002,
-, *Pengertian-Pengertian Dasar Tentang Tindak Pemerintahan (Bestuurshandeling)*, Djumali, Surabaya, 1985.
- dan Djatmiyati, Tatiek Sri, *Argumentasi Hukum*, Gajah Mada Univesity Press, Yogyakarta, 2005.
- Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Rineke Cipta, Jakarta, 2008.
-, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001.
-, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Hartanti, Evi, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

- Hiariej, Eddy OS, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014.
- HR, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Huda, Chairul, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2006.
- Hutchinson, Terry, *Researching and Writing in Law*, Lawbook Co., Pymont NSW 2009, Australia. 2002.
- Jonkers, Mr. J.E, *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*, Bina Aksara Utama, Jakarta, 1987.
- Kartono, Kartini, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Kelsen, Hans, *Teori Hukum Murni* (Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Empiris Deskriptif), alih bahasa Drs. Soemardi, Rimdi Pers, 1995.
-, *Dasar-dasar hukum Normatif*, Bandung, Nusa Media, 2008.
- Kurniawan, Ardeni, *Korupsi Di Indonesia: Keuangan Negara, Birokrasi dan Pengendalian Intern Mewujudkan Indonesia Bebas Dari Korupsi*, Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM, Yogyakarta, 2015.
- Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984.
- Latif, Abdul, *Hukum Administrasi Dalam Praktek Tindak Pidana Korupsi*, Kencana, Jakarta, 2014.
- Lotulung, Paulus Effendi, *Hukum Tata Usaha Negara dan Kekuasaan*, Salemba Humanika, Jakarta, 2013.
- Manan, Bagir, *Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah, Makalah pada Seminar Nasional Pengembangan Wilayah dan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Kawasan Pesisir dalam Rangka Penataan Ruang*, Fak. Hukum Unpad, Bandung, 2000.
- Maramis, Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012.

- Marbun, SF. dan MD, Moh. Mahfud, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberti, Yogyakarta, 1987.
- Mawardi, Irvan, *Paradigma Baru PTUN, Respon Peradilan Administrasi Terhadap Demokratisasi*, Thafa Media, Yogyakarta, 2016.
- Minarno, Nur Basuki, *Penyalahgunaan Wewenang Dan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*. Palangkaraya: Laksbang Mediatama, 2009.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2005.
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Muchsin, *Pelindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Surakarta, Magister Hukum Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana 2003.
- Mulyadi, Mahmud dan Surbakti, Feri Antoni, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, PT. Sofmedia, Jakarta, 2010.
- Muslimin, Amrah, *Beberapa Asas dan Pengertian Pokok tentang Administrasi dan Hukum Administrasi*, Alumni, Bandung, 1985.
- Mustafa, Bachsan, *Pokok-Pokok Administrasi Negara*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990.
- Permana, Tri Cahya Indra, *Catatan Kritis Terhadap Perluasan Kewenangan Mengadili Peradilan Tata Usaha Negara*, Genta Press, Yogyakarta, 2016.
- Permana, Tri Cahya Indra, *Hak Permohonan Pejabat/Badan Atas Dugaan Penyalahgunaan Wewenang: Bunga Rampai Peradilan Administrasi Kontemporer*, Editor Subur, dkk., Genta Press, Yogyakarta, 2014.
- Pound, Roscoe, *An Introduction to the Philosophy of Law*, New Haven, Yale University Press, 1978.
- Purbopranoto, Kuntjoro, *Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara*, Cetakan Kedua, Alumni, Bandung, 1978.
- Poerwadarminta, WJS., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, 1976.
- Radburch, Gustav, *Schule de Rechtsphilosophie*, Verlag Seherov, Heidelberg, 1846. Dalam Marwan Effendy, *Teori Hukum*, ME Center Group, Jakarta, 2014.

- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
-, *Hukum Progresif, Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
-, *Biarkan Hukum Mengalir*, Kompas, Jakarta, 2007.
- Rawls, John, *A Theory of Justice*, Oxfors University Press, London, 1973, diterjemahkan oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, 2011.
- Rommelink, J., *Hukum Pidana, Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2014.
- Said, Buchari, *Hukum Pidana Materiil*, Fakultas Hukum UNPAS, Bandung, 2015.
- Saleh, Moh., *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Cet. Kesembilan, Ichtiar Baru, Jakarta, 1990.
- Sapardjaja, Komariah E., *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil dalam Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 2002.
- Sarmida, Neng, Zurneti, Aria, Suryanti, Nilma, *Diktat Hukum Pidana*, Bagian Hukum Pidana Universitas Andalas, Padang, 2002.
- Setiono, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta, Magister Hukum Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana, 2004.
- Sidharta Arief, *Refleksi Tentang Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- Sianturi, S.R., *Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, BPK Gunung Mulia, Jakarta, 1982
- Sinaga, Patuan, *Dimensi-dimensi Hukum Administrasi Negara*, Hubungan Antara kekuasaan Dengan Povoir Diskretionnare Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, UII Pres, Yogyakarta, 2001.
- Soemitro, Rochmat, *Asas dan Dasar Perpajakan*, Refika Aditama, Bandung, 2004.
- _____, *Masalah Peradilan Administrasi Dalam Hukum Pajak di Indonesia*, Bandung, Ereso, 1979.

- Soeria, Atmadja Arifin P., *Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan Negara*, Gramedia, Jakarta, 1986.
- Stroink, E.A.M. dan Steenbeek, J.G., *Inleiding in het Staats-en. Administratief Recht*, Alphen aan den Rijn, Samsom H.D. Tjeenk Willink, 1985
- Sudarto, *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat*, Alumni, Bandung, 1983.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
- Supandi, *Hukum Peradilan Tata Usaha Negara*. Alumni, Bandung, 2016.
- Thalib, Abdul Rasyid, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, Disertasi PPS Unair, Surabaya, 2004.
- Utrecht, E., *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Cetakan Keempat, Universitas Padjajaran, Bandung, 1960.
- Utrecht, E., *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Pustaka Sinar Mas, Surabaya, 1994.
- Vollenhoven, Van dalam SF. Marbun dan Moh. Mahfud MD, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*. Liberty, Yogyakarta, 1987.
- Widnyana, I Made, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Fikahati Aneska, Jakarta, 2010.
- Wiyono, R., *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

2. Artikel Jurnal dan Makalah

- Agustina, Rosa, “*Perbuatan Melawan Hukum*”, Thesis, Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003.
- Djatmiati, Tatiek Sri, “*Prinsip Izin Usaha Industri di Indonesia*”, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2004.
- Djamiati, Tatiek Sri, Makalah “*Diskresi Dalam Konteks Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014*”, Makalah, disampaikan dalam Colloquium Membedah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan di Hotel Garden Palace Surabaya, 5 Juni 2015.
- Fakrullah, Zudan Arif, “*Tindakan Hukum Bagi Aparatur Penyelenggara Pemerintahan*”, Makalah, disampaikan dalam Seminar Nasional dalam rangka H.U.T.IKAHI Ke-62 dengan tema “*Undang-Undang Administrasi*

- Pemerintahan, *Menguatkan atau Melemahkan Upaya Pemberantasan Korupsi*, Hotel Mercure Ancol, Jakarta, 2015.
- Fathudin, “Tindak Pidana Korupsi (Dugaan Penyalahgunaan Wewenang) Pejabat Publik (Perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan)”, *Jurnal Cita Hukum* Vol. II, No. 1, Juni 2015.
- Philipus M. Hadjon, “*Pengkajian Ilmu Hukum*”, Makalah, Pelatihan Metode Hukum Normatif, Unair, Surabaya, 1997.
-, “*Tentang Wewenang*”, *Yuridika*, No. 5 dan 6, XII, September – Desember 1997.
-, “*Tentang Wewenang Pemerintahan (bestuurbevoegdheid)*”, *Pro Justitia*, XVI No. 1, Januari 1998.
-, *Discretionary Power dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB)*, Makalah, disampaikan pada Seminar Nasional “Aspek Pertanggung jawaban Pidana Dalam Kebijakan Publik Dari Tindak Pidana Konsep”, Semarang 6-7 Mei 2004.
- Nirwanto, Andhi D, *Arah Pemberantasan Korupsi Ke Depan (Pasca Undang-Undang Administrasi Pemerintahan)*, disampaikan dalam Seminar Nasional dalam rangka H.U.T. IKAHI Ke-62, Hotel Mercure Ancol, Jakarta, 2015.
- Sidharta, *Penemuan Hukum Melalui Putusan Hakim*, Makalah, disampaikan dalam Seminar Nasional Penguatan Pemahaman Hak Asasi Manusia Untuk Hakim Seluruh Indonesia, yang diselenggarakan oleh Komisi Yudisial RI, PUSHAM UII, dan Norsk Senter For Menneskerettigheter Norwegian Centre For Human Rights, Hotel Grand Angkasa, Medan, 2011.
- Susetio, Wasis, “Disharmoni Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Agraria”, *Jurnal Lex Jurnalica*, Vol. 10, No. 3, Desember 2013.
- Sitorus, Santer, “Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan” Slide Presentasi (PPT), disampaikan dalam Sosialisasi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, KemenPAN RB, Jakarta, 2015.
-, “Praktek Peradilan Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan”, Slide Presentasi (PPT), disampaikan dalam Colloquium Membedah Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang *Administrasi Pemerintahan*, Garden Palace, Surabaya, 2015.

Yulius, "Menyelisik Makna Penyalahgunaan Wewenang dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Ditinjau dari Optik Hermeneutika Hukum", *Varia Peradilan*. No. 360, 2015.

3. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380.

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5074.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Berita Negara Nomor 5587.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601.

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Intern Pengendalian Pemerintah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara.

4. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Surabaya Nomor: 57/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Sby atas nama Terdakwa TITIK SUNARSIH.

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 388K/Pid.Sus/2017, atas nama Terdakwa BUDIMAN EFFENDI.

Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat Nomor: 19/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST atas nama Terdakwa PROLIE RUSDEKAWATI.

5. Internet

Detik.com, “UU Administrasi Pemerintahan Dinilai Mengudeta Pemberantasan Korupsi”, <http://news.detik.com/berita/2873765/uu-administrasi-pemerintahan-dinilai-mengudeta-pem-berantasan-korupsi>, diakses 28 Februari 2016.

Dian Puji Simatupang, “Akademisi: Pengambil Kebijakan Publik Tak Dapat Dipidana”, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt531b60851cc21/akademisi--pengambil-kebijakan-publik-tak-dapat-dipidana>, diakses pada tanggal 26 September 2018.

Hukum Online, “Arti Menyalahgunakan Wewenang dalam Tindak Pidana Korupsi”, diakses pada 25 Mei 2015.

Rimawan Pradipto, “Politisasi dan Swasta Dominasi Terpidana Korupsi”, cegahkorupsi.feb.ugm.ac.id. diakses Maret 2019.

6. Lain-lain

Kejaksaan Agung Republik Indonesia, *Pedoman Pembuatan Surat Dakwaan*, Jakarta, 1985.

Poerwadarminta, WJS., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, 1976.